

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan pada bab IV dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Kinerja Keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Berdasarkan

Analisis Rasio

1. Rasio Efisiensi Belanja

Berdasarkan perhitungan rata-rata rasio efisiensi belanja Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2002-2014 dapat diketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki kriteria efisien yaitu sebesar 79%. Dari kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki realisasi pengeluaran daerah yang efisien dibandingkan dengan yang dianggarkan artinya realisasi belanja yang telah terealisasi tidak melebihi anggaran belanja yang ditetapkan.

2. Rasio Efektifitas PAD

Berdasarkan perhitungan rata-rata rasio efektifitas penerimaan PAD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2002-2014 dapat diketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki kriteria sangat efektif yaitu sebesar 102%, dikatakan sangat efektif karena rasio efektifitasnya berada diatas 100%. Dari kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki kemampuan merealisasikan PAD

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan dari perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2002-2014 dapat diketahui bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai setelah pemekaran daerah sangat rendah dengan nilai rata-rata sebesar 6,3%, mencerminkan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai masih sangat bergantung pada dana perimbangan maupun dana transfer dari pemerintah pusat.

5.1.2 Kinerja keuangan Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Analisis Rasio

1. Rasio Efisiensi Belanja

Berdasarkan perhitungan rata-rata rasio efisiensi belanja Kabupaten Padang Pariaman tahun 2002-2014 dapat diketahui bahwa Kabupaten Padang Pariaman memiliki kriteria kurang efisien yaitu sebesar 94%. Dari kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Padang Pariaman memiliki realisasi pengeluaran daerah yang kurang efisien dibandingkan dengan yang dianggarkan artinya pengeluaran untuk belanja hampir melebihi penerimaan sesuai dengan yang telah dianggarkan.



2. Rasio Efektifitas PAD

Berdasarkan perhitungan rata-rata rasio efektifitas penerimaan PAD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2002-2014 dapat diketahui bahwa Kabupaten Padang Pariaman memiliki kriteria sangat efektif dengan rata-rata rasio sebesar 116%. Dari kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Padang Pariaman memiliki kemampuan merealisasikan PAD dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan dari perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2002-2014 dapat diketahui bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman setelah pemekaran daerah sangat rendah dengan nilai rata-rata sebesar 3,8%, mencerminkan bahwa pemerintah Kabupaten Padang Pariaman masih sangat bergantung pada dana perimbangan maupun dana transfer dari pemerintah pusat.

5.1.3 Kinerja Keuangan Kota Pariaman Berdasarkan Analisis Rasio

1. Rasio Efisiensi Belanja

Berdasarkan perhitungan rata-rata rasio efisiensi belanja Kota Pariaman tahun 2002-2014 dapat diketahui bahwa Kota Pariaman memiliki kriteria cukup efisien dengan rata-rata sebesar 89,74%. Dari kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa Kota Pariaman memiliki realisasi pengeluaran daerah yang



cukup efisien, yang artinya pengeluaran tidak melebihi penerimaan yang telah dianggarkan dan selisih antara penerimaan dan pengeluaran belanja cukup jauh.

2. Rasio Efektifitas PAD

Berdasarkan perhitungan rata-rata rasio efektifitas penerimaan PAD Kota Pariaman tahun 2002-2014 dapat diketahui bahwa Kota Pariaman memiliki kriteria sangat efektif dengan rata-rata rasio sebesar 128,25%. Dari kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa Kota Pariaman memiliki kemampuan merealisasikan PAD dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan dari perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Pariaman pada tahun 2002-2014 dapat diketahui bahwa kemandirian keuangan daerah Kota Pariaman setelah pemekaran daerah sangat rendah dengan nilai rata-rata 3,2%, mencerminkan bahwa pemerintah Kota Pariaman masih sangat bergantung pada dana perimbangan maupun dana transfer dari pemerintah pusat.

5.1.4 Perbandingan Kinerja Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman dan, Kota Pariaman.

1. Berdasarkan Rasio Efisiensi Belanja

Tingkat efisiensi belanja Kabupaten Padang Pariaman lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Pariaman dan Kabupaten



Kepulauan Mentawai pada periode 2010-2014, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kurang efisien dalam menganggarkan pengeluaran daerahnya dibandingkan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Akan tetapi, untuk tingkat efisiensi belanja Kota Pariaman dan Kepulauan Mentawai dikategorikan cukup efisien yang artinya Kota Pariaman dan Kepulauan Mentawai lebih efisien dalam menganggarkan pengeluaran daerahnya dibandingkan dengan Kabupaten Padang Pariaman.

2. Berdasarkan Rasio Efektifitas PAD

Tingkat efektifitas penerimaan PAD Kota Pariaman lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada periode 2010-2014, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Pariaman lebih efektif dalam menjalankan tugasnya untuk merealisasikan penerimaan PAD yang dianggarkan dibanding dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Akan tetapi, untuk tingkat efektifitas penerimaan PAD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman dikategorikan sangat efektif.

3. Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Pariaman



dan Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2010-2014, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai lebih mampu memanfaatkan sumber PAD dan tidak hanya bergantung pada dana perimbangan atau dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemerintahannya dibandingkan dengan Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Pola hubungan antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman dengan pemerintah pusat dikategorikan ke dalam pola rendah sekali, dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dari peranan daerah kabupaten/kota dalam membiayai pelaksanaan program pemerintah daerah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek Penelitian hanya terbatas pada Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman.
2. Penelitian ini terbatas pada pengamatan data APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman tahun 2002-2014.
3. Penelitian ini terbatas pada penggunaan analisis rasio keuangan berupa rasio efisiensi belanja, rasio efektifitas penerimaan PAD, rasio kemandirian keuangan daerah.
4. Penelitian ini tidak mempertimbangkan keadaan sosial, ekonomi dan politik pada daerah yang menjadi objek penelitian.

5. Terbatasnya data APBD dan Realisasi APBD tahun 1999-2001 yang tersedia di website <http://djkp.depkeu.go.id>

5.3 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penerimaan sumber pendapatan daerah yang ada atau menambah sumber pendapatan daerah yang baru serta mengurangi ketergantungan terhadap pusat melalui dana perimbangan.
2. Untuk pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman memiliki rata-rata efektifitas penerimaan PAD tinggi maka diharapkan pada pemerintah daerah agar bisa mempertahankan atau lebih meningkatkan target penerimaan PAD.
3. Untuk pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman diharapkan untuk lebih efisien dalam menganggarkan belanja daerah sehingga tingkat belanja yang terealisasi hasilnya akan efisien.

